Sistem Prosedur Informasi Akuntansi Penggajian pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram

I Gede Yogi Januartha*[1], Ni Luh Putu Anom Pancawati[2], Nengah Sukendri[3]
Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram[1,2,3]
*e-mail: yogijanu09@gmail.com

ABSTRAK

Penerapan sistem informasi akuntansi penggajian pada instansi pemerintah menjadi aspek penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Meskipun pemanfaatan aplikasi digital telah diterapkan, evaluasi terhadap sistem, prosedur, dan pengendalian internal masih diperlukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem informasi akuntansi penggajian, prosedur pelaksanaan penggajian, dan pengendalian internal pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan Teori Sistem Informasi Akuntansi oleh Romney (2018) dan Mulyadi (2016) serta Teori Pengendalian Internal oleh Tunggal (2016), yang didukung oleh kajian penelitian terdahulu. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi penggajian telah berjalan dengan baik melalui pemanfaatan aplikasi GPP dan SAKTI, didukung prosedur penggajian yang sesuai standar operasional serta pengendalian internal melalui pemisahan tugas, otorisasi berjenjang, verifikasi, dan pengawasan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terpadu mengenai sistem informasi akuntansi penggajian, prosedur penggajian, dan pengendalian internal pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram dalam konteks implementasi aplikasi GPP dan SAKTI. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi sistem secara berkala guna meningkatkan efektivitas, keamanan data, dan kualitas pengendalian internal.

Kata kunci : *Sistem Informasi Akuntansi; Prosedur Penggajian; Pengendalian Internal.*

ABSTRACT

The implementation of payroll accounting information systems in government agencies is a crucial aspect of achieving effective, transparent, and accountable financial management. Although digital applications have been adopted, evaluating the systems, procedures, and internal controls remains necessary to ensure effective implementation. This study aims to analyze the payroll accounting information system, payroll execution procedures, and internal controls at the National Land Agency (BPN) Office of Mataram City. The study draws upon Accounting Information System theories by Romney (2018) and Mulyadi (2016) and Internal Control theory by Tunggal (2016), supported by a review of prior research. A descriptive qualitative research method was employed, utilizing data collection techniques such as observation, semi-structured interviews, and documentation. Data analysis followed the Miles, Huberman, and Saldana model—involving data reduction, data display, and conclusion drawing—complemented by triangulation of sources, techniques, and time. The results indicate that the payroll accounting information system is functioning effectively through the use of GPP and SAKTI applications, supported by payroll procedures that adhere to standard operating procedures and internal controls involving segregation of duties, tiered authorization, verification, and supervision. The novelty of this research lies in its integrated analysis of the payroll accounting information system, payroll procedures, and internal controls at the Mataram City BPN Office within the context of GPP and SAKTI application implementation. The study recommends periodic system evaluations to enhance effectiveness, data security, and the quality of internal controls.

Keywords **:** *Accounting Information System; Payroll Procedures; Internal Control.*

PENDAHULUAN

Sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan sistem yang berfungsi mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan secara akurat untuk mendukung pengambilan keputusan organisasi (Indrasti & Sulistyawati, 2021). Penerapan Sistem Informasi Aakuntansi yang terintegrasi memungkinkan organisasi mengelola data keuangan secara lebih efektif, meningkatkan efisiensi proses administrasi, serta menghasilkan informasi yang andal sebagai dasar perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem informasi akuntansi turut membantu meminimalkan kesalahan pencatatan, mempercepat proses pengolahan data, serta memperkuat pengendalian internal sehingga informasi yang dihasilkan lebih akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Fibriyanti et al., 2017).

Dalam implementasinya, sistem informasi akuntansi terdiri atas berbagai subsistem yang saling terintegrasi, salah satunya adalah sistem informasi akuntansi penggajian. Sistem ini mengelola seluruh proses penggajian pegawai, mulai dari pencatatan kehadiran, perhitungan gaji, tunjangan, dan potongan hingga pembayaran gaji secara periodik (Lailiyah, 2022). Penerapan sistem penggajian yang baik dapat meningkatkan efisiensi administrasi, meminimalkan kesalahan perhitungan, serta menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan andal (Juliarsa, 2022). Selain menjamin ketepatan dan ketepatan waktu pembayaran hak pegawai, sistem penggajian yang dikelola dengan baik juga berkontribusi terhadap peningkatan motivasi kerja dan mendukung tercapainya kinerja organisasi yang lebih optimal (Intishar & Muanas, 2018).

Sistem informasi akuntansi penggajian tidak hanya berfungsi sebagai sarana pencatatan dan pembayaran gaji, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas pengendalian internal organisasi (Wasundhari & Pasek, 2024). Pengendalian tersebut diwujudkan melalui penerapan prosedur yang jelas, pemisahan tugas, serta otorisasi yang memadai sehingga dapat meminimalkan kesalahan administrasi dan risiko penyalahgunaan dalam pelaksanaan penggajian (Suryanti et al., 2023). Dengan demikian, penerapan prosedur penggajian secara konsisten diperlukan untuk menjamin ketertiban proses, menghasilkan informasi yang akurat, serta mendukung efektivitas pengendalian internal organisasi (Indrastari et al., 2025).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi penggajian yang baik dapat meningkatkan efektivitas pengendalian internal serta mendukung ketepatan penyajian informasi keuangan (Mairani & Putri, 2023). Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterlambatan pembaruan data pegawai, kesalahan entri data secara manual, dan pemisahan tugas yang belum optimal sehingga dapat menyebabkan kesalahan perhitungan maupun keterlambatan pembayaran gaji. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat celah penelitian, yaitu masih terbatasnya kajian yang menganalisis penerapan sistem informasi akuntansi penggajian, prosedur pelaksanaan penggajian, dan pengendalian internal secara terpadu pada instansi pemerintah (Wulaningrum & Ayuningsih, 2022). Selain itu, setiap instansi pemerintah memiliki karakteristik organisasi, struktur kerja, serta kebijakan yang berbeda sehingga penerapan sistem informasi akuntansi penggajian dan pengendalian internal dapat menghasilkan kondisi yang berbeda (Rahmawati & Hambani, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram untuk memberikan gambaran mengenai penerapan sistem informasi akuntansi penggajian, prosedur pelaksanaan penggajian, dan pengendalian internal yang diterapkan pada instansi tersebut.

Pada instansi sektor publik, sistem informasi akuntansi penggajian memiliki peran penting karena berkaitan dengan pengelolaan pegawai dan penggunaan anggaran pemerintah. Diperlukan sistem dan prosedur penggajian yang jelas agar pembayaran gaji dapat dilakukan secara tepat waktu dan akurat (Natalia, 2020). Selain berfungsi sebagai alat administrasi keuangan, sistem informasi akuntansi penggajian juga berperan sebagai sarana manajerial yang mendukung efektivitas pengelolaan organisasi (Mulyati & Kisa, 2019).

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) penggajian di lingkungan Badan Pertanahan Nasional mulai menyesuaikan kebijakan digitalisasi pengelolaan keuangan pemerintah melalui penggunaan Aplikasi GPP/SAKTI yang terintegrasi dengan sistem Kementerian Keuangan sejak tahun 2023. Implementasi sistem tersebut merupakan bagian dari migrasi nasional dari aplikasi *Government Payroll Package* (GPP) berbasis

desktop menuju sistem penggajian berbasis web. Penerapan sistem berbasis digital ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, akurasi, serta pengawasan dalam pengelolaan administrasi penggajian pegawai.

Dalam pelaksanaannya, sistem penggajian harus didukung oleh pengendalian internal yang memadai untuk memastikan proses berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Saputra et al., 2023). Pengendalian internal berperan penting dalam menjaga keandalan informasi keuangan, melindungi aset organisasi, serta meminimalkan risiko kesalahan dan kecurangan dalam proses penggajian (Kesaulya, 2025). Salah satu bentuk penerapannya adalah melalui pemisahan tugas yang jelas antara pencatatan kehadiran, perhitungan gaji, otorisasi, dan pembayaran gaji guna mencegah penyalahgunaan wewenang serta meningkatkan efektivitas pengendalian dalam proses penggajian (Aditya et al., 2024). Untuk memperkuat pengendalian tersebut, setiap transaksi penggajian juga harus memperoleh otorisasi dari pihak yang berwenang agar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (Bella, 2022).

Pemanfaatan sistem komputerisasi dapat meningkatkan efisiensi dan ketepatan pengolahan data penggajian sehingga proses administrasi menjadi lebih efektif (Triasari & Maria, 2022). Namun, penggunaan teknologi informasi juga memerlukan pengendalian yang memadai untuk menjaga keamanan dan keandalan data. Penerapan pembatasan akses serta pengamanan sistem penggajian menjadi penting guna meminimalkan risiko kesalahan pengolahan data maupun akses tidak sah terhadap informasi keuangan (Farida et al., 2022).

Dalam instansi pemerintah, sistem penggajian harus mendukung prinsip *Good Governance* melalui penerapan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan keuangan negara (Khairudin, 2023). Penerapan prinsip tersebut penting untuk meningkatkan pengawasan, membangun kepercayaan pegawai, serta menciptakan pengelolaan keuangan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kelengkapan dokumen dalam proses penggajian memudahkan pelaksanaan pengawasan maupun audit terhadap setiap transaksi yang dilakukan (Sumarno, 2020).

Kesalahan dalam proses penggajian, seperti keterlambatan pembayaran dan ketidaktepatan perhitungan gaji, dapat mengganggu kelancaran administrasi serta menurunkan efektivitas organisasi (Nainggolan, 2023). Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi penggajian yang dapat membantu mengelola gaji dengan benar diperlukan, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Septiani, 2017). Berdasarkan uraian tersebut, sistem informasi akuntansi penggajian yang didukung prosedur terstruktur dan pengendalian internal yang baik memiliki peran penting dalam pengelolaan administrasi keuangan, khususnya pada instansi pemerintah (Ayu, 2025).

Salah satu instansi pemerintah yang menerapkan sistem informasi akuntansi penggajian adalah Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram. Dalam pelaksanaan penggajian, instansi ini melibatkan berbagai tahapan administrasi serta beberapa pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda. Kondisi tersebut memerlukan sistem dan prosedur penggajian yang jelas serta didukung oleh pengendalian internal yang memadai agar proses penggajian berjalan efektif, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Agustini, 2021). Penerapan sistem informasi akuntansi penggajian yang baik juga berperan dalam mendukung efektivitas pengendalian internal serta meminimalkan risiko kesalahan maupun penyimpangan dalam proses penggajian (Sari & Molinda, 2024).

Sebagai instansi pemerintah yang mengelola administrasi kepegawaian dan anggaran negara, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram dituntut menerapkan sistem penggajian yang tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, instansi ini dipilih sebagai lokasi penelitian untuk menganalisis penerapan sistem dan prosedur informasi akuntansi penggajian serta pengendalian internal yang diterapkan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai mekanisme pengelolaan penggajian sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas administrasi penggajian (Wardany, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan sistem informasi akuntansi penggajian, prosedur pelaksanaan penggajian, dan pengendalian internal pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai mekanisme pengelolaan penggajian, mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaannya, serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi penggajian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai sistem dan prosedur informasi akuntansi penggajian yang diterapkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram. Menurut (Sugiyono, 2010), metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengkaji objek dalam kondisi yang alamiah, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi, analisis data bersifat induktif, serta hasil penelitian lebih menekankan pada pemaknaan daripada generalisasi. Sementara itu, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis berbagai fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan sistem dan prosedur informasi akuntansi penggajian pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram.

Penelitian dilakukan secara langsung (data primer) dengan melakukan observasi pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram. Melalui metode ini, peneliti dapat menelusuri alur penggajian mulai dari pencatatan data pegawai, pengolahan data kehadiran, perhitungan gaji dan tunjangan, proses otorisasi, hingga tahap pembayaran dan pencatatan akuntansi. Selain itu, rancangan penelitian.ini juga menekankan pada analisis prosedur penggajian yang berlaku, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab antar bagian yang terlibat, seperti bagian kepegawaian, bagian keuangan, dan pihak yang berwenang dalam proses otorisasi. Pemisahan fungsi ini menjadi aspek penting dalam penelitian karena berkaitan langsung dengan efektivitas pengendalian internal dan pencegahan kesalahan dalam pengelolaan gaji.

Dalam rancangan penelitian ini, data dikumpulkan melalui berbagai teknik, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, guna memperoleh informasi yang saling melengkapi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara membandingkan kondisi aktual sistem dan prosedur penggajian dengan teori sistem informasi akuntansi, konsep pengendalian internal, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas dan kelayakan sistem dan prosedur informasi akuntansi penggajian yang diterapkan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses penggajian yang berlangsung, wawancara dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan sistem penggajian pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Menurut (Putri & Murhayati, 2025), teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan materi audiovisual untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model (Miles et al., 2014) menyatakan bahwa teknik analisis data kualitatif terdiri dari beberapa tahapan yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga data mencapai titik jenuh. Reduksi data dilakukan sebagai tahapan awal dalam proses analisis dengan cara menyeleksi, menyusun, dan menyederhanakan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan perhatian pada informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian, sehingga data yang terkumpul dapat diorganisasikan secara lebih sistematis dan memudahkan proses pemahaman terhadap penerapan sistem dan prosedur informasi akuntansi penggajian yang menjadi objek penelitian.

Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi yang telah diperoleh ke dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau bagan sehingga lebih mudah dipahami dan dianalisis. Melalui tahap ini, peneliti dapat melihat keterkaitan antar data secara lebih jelas, yang pada akhirnya membantu dalam proses interpretasi hasil penelitian serta penyusunan kesimpulan.

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi *(Conclusion Drawing/Verification)*. Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi secara terus-menerus dengan cara membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar data yang dihasilkan valid dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paparan data penelitian ini disusun berdasarkan rumusan masalah melalui hasil observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram.

Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu untuk menjamin validitas temuan. Informan penelitian berjumlah delapan orang yang terdiri atas Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), Bendahara, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), serta empat orang staf pegawai. Seluruh informan dipilih karena terlibat langsung dalam proses pengelolaan penggajian sehingga mampu memberikan informasi yang komprehensif mengenai sistem informasi akuntansi, prosedur penggajian, dan pengendalian internal yang diterapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor BPN Kota Mataram telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan penggajian melalui aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Gaji Pegawai Pemerintah (GPP). Kedua aplikasi tersebut digunakan secara terintegrasi untuk mengelola data kepegawaian, data kehadiran, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, tunjangan, potongan, hingga proses pembayaran gaji. Penggunaan sistem tersebut didukung oleh prosedur kerja yang jelas serta pembagian tugas antarpegawai sehingga proses penggajian dapat berlangsung secara efektif, akurat, dan akuntabel.

1. Peran Sistem Informasi Akuntansi Penggajian

Berdasarkan hasil observasi, proses penggajian di Kantor BPN Kota Mataram telah memanfaatkan aplikasi SAKTI dan GPP sebagai sistem utama dalam pengelolaan administrasi penggajian. Sistem tersebut digunakan mulai dari penginputan data pegawai, pembaruan informasi kepegawaian, perhitungan gaji beserta tunjangan dan potongan, hingga penyusunan daftar gaji. Setiap perubahan data kepegawaian diperbarui dalam sistem sehingga informasi yang digunakan selalu sesuai dengan kondisi terkini.

Observasi juga menunjukkan bahwa pelaksanaan penggajian dilakukan secara bertahap. Setelah data pegawai diperbarui, sistem melakukan perhitungan gaji berdasarkan komponen penghasilan dan potongan yang berlaku. Hasil perhitungan kemudian diverifikasi oleh pejabat yang berwenang sebelum diproses menjadi Surat Perintah Membayar (SPM) dan diteruskan ke proses pembayaran. Seluruh tahapan didukung oleh dokumen elektronik yang tersimpan dalam sistem sehingga setiap perubahan data dapat ditelusuri dengan mudah. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengolah data, tetapi juga sebagai sarana dokumentasi dan pengawasan.

Hasil wawancara memperkuat temuan observasi. Seluruh informan menyatakan bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi memberikan manfaat yang signifikan terhadap proses penggajian. PPABP menjelaskan bahwa sistem mempermudah pengelolaan data pegawai dan penyusunan daftar gaji sehingga pekerjaan menjadi lebih teratur. Bendahara menyampaikan bahwa sistem membantu memastikan kesesuaian data sebelum pembayaran dilakukan sehingga penyaluran gaji dapat berlangsung tepat waktu. PPK menilai sistem sangat membantu proses penatausahaan keuangan karena seluruh data tersusun secara sistematis dan memudahkan proses verifikasi. Sementara itu, PPSPM menjelaskan bahwa sistem mendukung proses pemeriksaan dokumen sebelum penerbitan Surat Perintah Membayar sehingga pembayaran hanya dilakukan terhadap data yang telah dinyatakan lengkap dan benar.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh staf pegawai sebagai penerima gaji. Mereka menilai bahwa sistem penggajian yang diterapkan telah mampu mempercepat proses administrasi, mengurangi kesalahan perhitungan, serta memberikan kepastian bahwa hak pegawai diterima sesuai ketentuan. Dengan demikian, seluruh informan memiliki persepsi yang sama bahwa sistem informasi akuntansi memberikan kontribusi nyata terhadap efektivitas pelaksanaan penggajian.

Dokumentasi penelitian semakin memperkuat hasil tersebut melalui bagan Sistem Informasi Akuntansi penggajian. Flowchart menunjukkan bahwa proses diawali dari pengumpulan data kehadiran pegawai sebagai dasar perhitungan gaji. Selanjutnya PPABP mengolah data penggajian, menghitung PPh Pasal 21, menyusun daftar gaji dan slip gaji, kemudian menyerahkannya kepada bagian keuangan untuk diperiksa. Apabila ditemukan kesalahan, dokumen dikembalikan untuk diperbaiki. Sebaliknya, apabila telah sesuai, daftar gaji diajukan kepada pimpinan untuk memperoleh persetujuan sebelum diteruskan kepada bank penyalur guna melakukan transfer gaji ke rekening masing-masing pegawai. Alur tersebut menunjukkan bahwa setiap tahapan memiliki mekanisme pemeriksaan sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan penggajian pegawai di Kantor BPN

Kota Mataram. Sistem mampu mengintegrasikan pengelolaan data kepegawaian, perhitungan gaji, verifikasi, penyusunan dokumen, hingga pembayaran gaji secara lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) penggajian di Kantor BPN Kota Mataram telah sesuai dengan konsep yang dikemukakan Sururi et al. (2022), yaitu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi penggajian secara akurat dan tepat waktu. Penggunaan aplikasi SAKTI dan GPP membuktikan bahwa seluruh proses penggajian telah dilakukan secara terintegrasi sehingga mampu meningkatkan efisiensi administrasi dan kualitas informasi yang dihasilkan.

Temuan ini juga mendukung teori Romney (2018) dan Mulyadi (2016) yang menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi berfungsi menghasilkan informasi yang dibutuhkan organisasi dalam mendukung kegiatan operasional dan pengambilan keputusan. Pada penelitian ini, informasi yang dihasilkan tidak hanya digunakan untuk pembayaran gaji, tetapi juga sebagai dasar verifikasi, pengawasan, dan penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan.

Selain meningkatkan efisiensi, penggunaan sistem informasi akuntansi juga berkontribusi terhadap penguatan pengendalian internal. Pembatasan akses pengguna, dokumentasi elektronik, verifikasi berjenjang, serta jejak audit yang tersedia dalam sistem memungkinkan setiap perubahan data dapat ditelusuri. Kondisi ini sejalan dengan konsep pengendalian internal menurut Tunggal (2016) yang menekankan pentingnya perlindungan aset, keandalan informasi, dan efektivitas operasional melalui mekanisme pengawasan yang memadai.

Temuan penelitian juga konsisten dengan hasil penelitian Wulaningrum et al. (2022) yang menyatakan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi penggajian mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan penggajian melalui pengolahan data yang lebih sistematis. Demikian pula penelitian Aura dan Kamilah (2024) menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berperan dalam meningkatkan akurasi, transparansi, dan ketepatan waktu pembayaran gaji. Kondisi tersebut terlihat jelas pada Kantor BPN Kota Mataram, di mana seluruh tahapan penggajian dilakukan secara terintegrasi melalui aplikasi SAKTI dan GPP sehingga mampu mengurangi potensi kesalahan manual dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pegawai.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Akuntansi penggajian telah memberikan manfaat yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan penggajian. Integrasi antara teknologi informasi, prosedur kerja, serta pembagian tugas yang jelas mampu menghasilkan informasi yang akurat, mempercepat proses administrasi, meningkatkan ketepatan pembayaran gaji, dan memperkuat pengendalian internal organisasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi telah berfungsi tidak hanya sebagai alat pengolahan data, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam mendukung tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Peran Prosedur Penggajian pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram

Berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan penggajian di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram dilaksanakan melalui prosedur yang sistematis dan berjenjang. Setiap tahapan melibatkan pejabat yang memiliki tugas dan kewenangan berbeda sehingga seluruh proses dapat berjalan secara tertib serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses penggajian diawali dengan pembaruan data kepegawaian oleh Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), meliputi data kehadiran, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, perubahan status pegawai, serta komponen hak keuangan lainnya. Data tersebut menjadi dasar dalam penyusunan daftar gaji sebelum dilakukan pemeriksaan, verifikasi, dan otorisasi.

Hasil observasi menunjukkan bahwa setelah daftar gaji disusun oleh PPABP, dokumen diperiksa oleh Bendahara untuk memastikan kesesuaian data dan kelengkapan administrasi. Selanjutnya, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) melakukan verifikasi terhadap aspek administrasi maupun perhitungan keuangan. Tahap berikutnya adalah pemberian otorisasi oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Setelah seluruh tahapan dinyatakan sesuai, pembayaran gaji dilakukan melalui transfer ke rekening masing-masing pegawai dan seluruh dokumen diarsipkan sebagai bagian dari administrasi keuangan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa setiap tahapan saling berkaitan dan memiliki fungsi pengendalian yang mendukung ketepatan pelaksanaan penggajian.

Hasil wawancara dengan seluruh informan memperkuat temuan observasi. PPABP menjelaskan bahwa prosedur penggajian menjadi pedoman utama dalam melaksanakan seluruh aktivitas pengelolaan gaji, mulai dari pengumpulan data hingga pembayaran. Bendahara menyampaikan bahwa prosedur memberikan arah yang jelas sehingga setiap proses dapat dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan. PPK menambahkan bahwa prosedur memudahkan pelaksanaan verifikasi karena setiap dokumen telah melalui tahapan yang telah ditetapkan. Sementara itu, PPSPM menegaskan bahwa proses penandatanganan Surat Perintah Membayar hanya dilakukan apabila seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi.

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh staf pegawai sebagai penerima gaji. Para pegawai menilai bahwa prosedur penggajian yang diterapkan telah berjalan dengan baik karena pembayaran selalu dilakukan sesuai jadwal dan didahului oleh proses pemeriksaan serta verifikasi. Menurut mereka, mekanisme tersebut memberikan kepastian bahwa pembayaran gaji dilakukan secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keseragaman pendapat dari seluruh informan menunjukkan bahwa prosedur penggajian telah dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh seluruh pihak yang terlibat.

Dokumentasi penelitian berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) penggajian semakin memperjelas alur pelaksanaan penggajian di Kantor BPN Kota Mataram. SOP menunjukkan bahwa PPABP bertugas mengelola data kepegawaian dan menyusun daftar gaji, Bendahara melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen dan kesesuaian anggaran, PPK melaksanakan pengujian serta verifikasi administrasi, sedangkan PPSPM melakukan pengujian akhir sebelum menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Selanjutnya, dokumen diteruskan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian bank penyalur mentransfer gaji ke rekening pegawai. Alur tersebut menunjukkan adanya pembagian fungsi yang jelas serta mekanisme pengawasan pada setiap tahapan.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa prosedur penggajian di Kantor BPN Kota Mataram telah diterapkan secara sistematis dan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan penggajian. Prosedur tersebut tidak hanya mengatur urutan pekerjaan, tetapi juga memperjelas tanggung jawab masing-masing pejabat sehingga seluruh proses dapat berjalan secara efektif, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penggajian di Kantor BPN Kota Mataram telah memenuhi prinsip-prinsip prosedur penggajian sebagaimana dikemukakan oleh Koerniawan (2012), yaitu rangkaian aktivitas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, perhitungan gaji, verifikasi, otorisasi, pembayaran, hingga pencatatan administrasi secara sistematis. Seluruh tahapan tersebut telah dilaksanakan secara berurutan dengan melibatkan pejabat yang memiliki kewenangan berbeda sehingga mampu menciptakan proses penggajian yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan prosedur tersebut juga didukung oleh penggunaan aplikasi SAKTI dan GPP yang mengintegrasikan setiap tahapan penggajian. Kehadiran sistem informasi memungkinkan proses penginputan data, perhitungan gaji, penyusunan daftar gaji, hingga verifikasi dilakukan secara lebih cepat dan akurat dibandingkan metode manual. Integrasi antara prosedur kerja dan teknologi informasi menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengolah data, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan setiap prosedur dilaksanakan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori Sistem Informasi Akuntansi yang dikemukakan Romney (2018) dan Mulyadi (2016), yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berfungsi menghasilkan informasi yang relevan dan andal untuk mendukung kegiatan operasional organisasi. Dalam konteks penelitian ini, prosedur penggajian yang terintegrasi dengan aplikasi SAKTI dan GPP menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, serta memudahkan proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan oleh pejabat yang berwenang.

Selain itu, penerapan prosedur yang sistematis juga memperkuat pengendalian internal organisasi. Pembagian tugas antara PPABP, Bendahara, PPK, dan PPSPM mencerminkan adanya pemisahan fungsi yang bertujuan mengurangi risiko kesalahan maupun penyalahgunaan wewenang. Setiap tahapan dilengkapi dengan mekanisme pemeriksaan dan verifikasi sehingga pembayaran gaji hanya dapat dilakukan apabila seluruh dokumen telah dinyatakan lengkap dan sesuai. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep pengendalian

internal menurut Tunggal (2016) yang menekankan pentingnya pemisahan tugas, otorisasi, verifikasi, dan dokumentasi dalam menjaga efektivitas pengelolaan keuangan.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Wulaningrum et al. (2022) yang menyimpulkan bahwa prosedur penggajian yang dilaksanakan secara sistematis mampu meningkatkan efektivitas proses penggajian. Penelitian Yanti dan Reviandani (2023) juga menunjukkan bahwa kejelasan pembagian tugas, penggunaan dokumen pendukung, dan prosedur pembayaran yang terstruktur berperan penting dalam menciptakan pengelolaan penggajian yang tertib dan akuntabel. Temuan tersebut sesuai dengan kondisi di Kantor BPN Kota Mataram, di mana seluruh tahapan penggajian telah dilaksanakan berdasarkan SOP yang jelas serta didukung oleh penggunaan sistem informasi terintegrasi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penggajian di Kantor BPN Kota Mataram telah berfungsi secara efektif sebagai pedoman operasional dalam setiap tahapan penggajian. Kejelasan alur kerja, pembagian tugas, mekanisme pemeriksaan, serta dukungan sistem informasi mampu meningkatkan ketertiban administrasi, mempercepat proses penggajian, meminimalkan kesalahan, dan memastikan pembayaran gaji dilakukan secara tepat waktu serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, prosedur penggajian tidak hanya mendukung kelancaran operasional, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan tata kelola keuangan organisasi.

3. Penerapan Pengendalian Internal Sistem Penggajian pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram

Berdasarkan hasil observasi, pengendalian internal dalam sistem penggajian di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram telah diterapkan melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas pada setiap tahapan proses penggajian. Pengawasan dilakukan oleh Kepala Kantor selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sedangkan pelaksanaan operasional melibatkan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), Bendahara, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Masing-masing pihak menjalankan fungsi sesuai kewenangannya, mulai dari pengelolaan data kepegawaian, penyusunan daftar gaji, pemeriksaan dokumen, verifikasi administrasi, hingga pemberian otorisasi sebelum pembayaran dilakukan.

Observasi juga menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi GPP dan SAKTI menjadi bagian penting dari mekanisme pengendalian internal. Kedua aplikasi tersebut mendukung pengelolaan data pegawai, komponen gaji, tunjangan, potongan, serta penyusunan dokumen penggajian secara terintegrasi. Setiap perubahan data dicatat dalam sistem dan hanya dapat diproses setelah melalui tahapan pemeriksaan dan persetujuan sesuai kewenangan masing-masing. Dengan demikian, sistem tidak hanya mempermudah pengolahan data, tetapi juga meningkatkan keamanan informasi serta meminimalkan risiko kesalahan maupun penyalahgunaan data.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh informan menilai pengendalian internal telah berjalan dengan baik. PPABP menjelaskan bahwa pemisahan tugas, penggunaan aplikasi GPP, dan verifikasi berjenjang mampu mencegah terjadinya kelebihan maupun kekurangan pembayaran gaji. Bendahara menyampaikan bahwa pembayaran hanya dilakukan berdasarkan dokumen yang telah dinyatakan lengkap dan sah sehingga risiko kesalahan administrasi dapat diminimalkan. PPK menambahkan bahwa proses verifikasi secara menyeluruh memastikan setiap dokumen telah memenuhi ketentuan sebelum diteruskan ke tahap berikutnya. Sementara itu, PPSPM menegaskan bahwa penerbitan Surat Perintah Membayar hanya dilakukan setelah seluruh dokumen melalui proses pengujian dan dinyatakan sesuai.

Pandangan serupa disampaikan oleh staf pegawai sebagai penerima gaji. Mereka menilai bahwa adanya beberapa tahapan pemeriksaan dan persetujuan membuat proses penggajian lebih tertib, transparan, dan memberikan kepastian bahwa gaji diterima sesuai hak yang seharusnya. Pegawai juga menyatakan bahwa selama ini pembayaran gaji berlangsung tepat waktu dan jarang ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan kesalahan perhitungan maupun keterlambatan pembayaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian internal tidak hanya dirasakan oleh pejabat pengelola keuangan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi pegawai sebagai penerima layanan.

Dokumentasi penelitian memperkuat temuan tersebut melalui berbagai dokumen pendukung, seperti aplikasi GPP, SAKTI, MyIntress, Monitoring ADK Gaji, Surat Perintah Membayar (SPM), serta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Seluruh dokumen tersebut menunjukkan bahwa proses penggajian telah

terdokumentasi secara sistematis dan dapat ditelusuri pada setiap tahapannya. Keberadaan dokumen pendukung tersebut juga mempermudah proses audit, evaluasi, maupun pengawasan apabila diperlukan di kemudian hari.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal pada sistem penggajian di Kantor BPN Kota Mataram telah diterapkan secara efektif melalui pemisahan tugas, penggunaan sistem informasi, pemeriksaan dokumen, verifikasi, serta otorisasi secara berjenjang. Mekanisme tersebut mampu menjaga keakuratan informasi penggajian, meminimalkan risiko kesalahan pembayaran, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan pengendalian internal di Kantor BPN Kota Mataram telah mencerminkan prinsip-prinsip pengendalian internal sebagaimana dikemukakan oleh Dince et al. (2022), yaitu adanya pemisahan fungsi, verifikasi, otorisasi, serta pengawasan dalam setiap tahapan penggajian. Pembagian tugas antara PPABP, Bendahara, PPK, dan PPSPM menunjukkan bahwa tidak terdapat pemusatan kewenangan pada satu pihak sehingga potensi terjadinya kesalahan maupun penyalahgunaan wewenang dapat diminimalkan.

Penerapan pengendalian internal tersebut juga didukung oleh penggunaan aplikasi GPP dan SAKTI yang memungkinkan setiap transaksi penggajian terdokumentasi secara elektronik. Integrasi sistem memberikan kemudahan dalam melakukan pelacakan data, pemeriksaan perubahan informasi, serta penyusunan dokumen pertanggungjawaban. Dengan demikian, sistem informasi akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai media pengolahan data, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam mendukung efektivitas pengendalian internal.

Hasil penelitian ini selaras dengan teori Pengendalian Internal menurut Tunggal (2016), yang menjelaskan bahwa pengendalian internal terdiri atas lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Pada Kantor BPN Kota Mataram, lingkungan pengendalian diwujudkan melalui pembagian tugas yang jelas, penilaian risiko dilakukan melalui proses pemeriksaan dan verifikasi dokumen, aktivitas pengendalian diterapkan melalui pemisahan fungsi dan otorisasi berjenjang, sedangkan informasi dan komunikasi didukung oleh aplikasi GPP, SAKTI, MyIntress, dan Monitoring ADK Gaji. Seluruh komponen tersebut saling mendukung dalam menciptakan proses penggajian yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, hasil penelitian juga mendukung teori Sistem Informasi Akuntansi yang dikemukakan oleh Romney (2018) dan Mulyadi (2016), yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan kombinasi antara manusia, prosedur, dokumen, teknologi, dan pengendalian yang menghasilkan informasi berkualitas bagi organisasi. Dalam penelitian ini, keterpaduan antara aplikasi penggajian, prosedur operasional, serta pembagian fungsi antarpejabat menghasilkan proses penggajian yang lebih efektif dan mampu menyediakan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan maupun pertanggungjawaban keuangan.

Temuan penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Astuti et al. (2022) yang menyimpulkan bahwa efektivitas pengendalian internal sangat dipengaruhi oleh kejelasan pembagian tugas, proses verifikasi, serta penggunaan sistem informasi. Penelitian Sari dan Nurhayati (2023) juga menunjukkan bahwa pemisahan fungsi, pemeriksaan dokumen, dan pemanfaatan teknologi informasi mampu meningkatkan keandalan sistem penggajian sekaligus mengurangi risiko kesalahan pembayaran. Kondisi tersebut terlihat jelas pada Kantor BPN Kota Mataram, di mana seluruh tahapan penggajian telah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang terdokumentasi dan didukung oleh aplikasi yang terintegrasi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi, prosedur penggajian, dan pengendalian internal saling melengkapi dalam mendukung pengelolaan penggajian pegawai di Kantor BPN Kota Mataram. Penggunaan aplikasi SAKTI dan GPP memberikan kemudahan dalam pengelolaan data dan penyusunan informasi, prosedur penggajian memastikan setiap tahapan dilaksanakan secara sistematis, sedangkan pengendalian internal menjamin bahwa seluruh proses berjalan sesuai ketentuan melalui mekanisme verifikasi, pemeriksaan, dan otorisasi berjenjang. Sinergi ketiga aspek tersebut menghasilkan proses penggajian yang lebih efektif, efisien, transparan, akurat, dan akuntabel.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Informasi Akuntansi penggajian di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram telah berjalan dengan baik. Sistem informasi yang didukung oleh aplikasi SAKTI dan GPP mampu meningkatkan

efektivitas pengelolaan data penggajian, prosedur penggajian telah dilaksanakan secara sistematis sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), sedangkan pengendalian internal diterapkan melalui pembagian tugas yang jelas, pemeriksaan, verifikasi, serta otorisasi berjenjang. Ketiga komponen tersebut saling mendukung dalam mewujudkan proses penggajian yang tepat waktu, akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menunjukkan kesesuaian dengan teori dan hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem dan prosedur informasi akuntansi penggajian pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram, dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) penggajian telah berjalan dengan baik melalui pemanfaatan aplikasi GPP dan SAKTI yang terintegrasi. Sistem tersebut mampu mendukung pengelolaan data kepegawaian, perhitungan komponen gaji, serta penyajian informasi penggajian secara akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga meningkatkan efektivitas pelaksanaan penggajian.

Selain itu, prosedur penggajian telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) melalui tahapan yang sistematis, mulai dari pencatatan kehadiran, pengolahan data, verifikasi, otorisasi, hingga pembayaran gaji. Setiap tahapan melibatkan pejabat sesuai dengan tugas dan kewenangannya sehingga mendukung tertib administrasi dan kelancaran proses penggajian. Pengendalian internal juga telah diterapkan secara efektif melalui pemisahan tugas, verifikasi dokumen, otorisasi berjenjang, dan pengawasan pada setiap tahapan penggajian. Penerapan tersebut mampu meningkatkan keamanan data, meminimalkan risiko kesalahan, serta mewujudkan pengelolaan penggajian yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram disarankan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan penerapan Sistem Informasi Akuntansi penggajian melalui evaluasi berkala terhadap penggunaan aplikasi GPP dan SAKTI, pembaruan data kepegawaian, serta peningkatan kompetensi pegawai yang terlibat dalam proses penggajian agar efektivitas dan keandalan sistem tetap terjaga.

Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian mengenai sistem informasi akuntansi penggajian, prosedur penggajian, dan pengendalian internal pada sektor publik. Penelitian berikutnya disarankan memperluas objek, menambah variabel, atau menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Sementara itu, bagi instansi pemerintah lainnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengembangkan sistem penggajian yang terintegrasi, didukung oleh prosedur yang jelas serta pengendalian internal yang memadai, sehingga mampu meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan penggajian.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, M. R., Simanjutak, D. A., Azziky, M. D., Paden, O., & Syahbani, M. F. (2024). *Pengembangan Sistem Akuntansi Penggajian Pada Autumn PetShop*. *4*(April), 9–15.

Agustini, S. (2021). *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada PT. Toyota Gosei Safety*. *13*(2), 116–131.

Ayu, N. (2025). *Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dengan Aplikasi Sipd Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kab. Ponorogo*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Bella, A. S. (2022). *Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Toko Zaki Di Kab. Tapin Provinsi Kalimantan Selatan*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Farida, U., Rapini, T., & Putro, R. L. (2022). *Pengendalian internal meminimalisir Financial Statement Fraud melalui Sistem Informasi Akuntansi Penggajian di RSU Muhammadiyah Ponorogo*. *6*, 3296–3304.

Fibriyanti, Y. V., Wijaya, U., & Surabaya, K. (2017). *Dalam Rangka Efektivitas Pengendalian Internal Perusahaan (Studi Kasus Pada Pt . Populer Sarana Medika , Surabaya)*. *II*(1), 371–384.

Indrastari, M., Ramadhani, C. A., Salsabila, J., & Apriliah, W. (2025). *Desain Sistem Informasi Akuntansi*

Penggajian Untuk Optimalisasi Efesiensi dan Akurasi Pengolahan Data Pada PT . Omni Metro Guardia Jakarta. *5*(2), 122–130.

Indrasti, D. M., & Sulistyawati, A. I. (2021). Penerapan sistem informasi akuntansi penggajian dalam menunjang efektifitas pengendalian internal. *Solusi*, *19*(2), 203–217.

Intishar, Y., & Muanas, M. (2018). Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Penggajian. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, *6*(2), 94–103.

Juliarsa, G. (2022). Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi, Kesesuaian Tugas, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Kinerja Pegawai. *E-Jurnal Akuntansi*.

Kesaulya, J. (2025). Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Karyawan Pada Pt. Aneka Sumber Tata Bahari Di Salahutu Maluku Tengah. *Journal Accounting Issues*, *2*(1), 51–59.

Khairudin, D. (2023). *Financing Perusahaan Initial Public Offering Tahun 2022 Menilai Pembangunan Good Government Governance di Indonesia*. *14*(2).

Lailiyah, S. N. (2022). *Analisis sistem informasi akuntansi penggajian dalam menunjang efektifitas pembayaran gaji pada pt sindo utama jaya*. *17*(1), 1–14.

Mairani, M., & Putri, R. Y. A. (2023). Analisis sistem informasi akuntansi penggajian karyawan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Impresi Indonesia*, *2*(4), 366–371.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis*. sage.

Mulyati, S., & Kisa, R. (2019). *Pengendalian Intern Persediaan (Studi Kasus PT . Gelflex Indonesia)*. *13*(2), 84–92.

Nainggolan, E. P. (2023). *Balance : Jurnal Akuntansi dan Manajemen Analisis Kinerja Pegawai dalam Penggunaan Sistem Informasi*. *2*(3).

Natalia, B. (2020). Analisa Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Untuk Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Internal Pada Pt Gamma Utama Sejati. *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)*, *1*, 171–178.

Putri, H. J., & Murhayati, S. (2025). *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*. *9*, 13074–13086.

Rahmawati, A., & Hambani, S. (2024). *Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Kantor Desa Bendungan Ciawi Kabupaten Bogor*. *3*, 12898–12908.

Saputra, B. E., Perwito, P., & Sufyana, C. M. (2023). Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Berbasis Web Pada Kantor Bpkad Muaro Jambi. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, *2*(10), 3456–3466.

Sari, J. P., & Molinda, S. (2024). *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Karyawan Pada Klinik Pratama Sehat Kota Gunungsitoli*. 1440–1451.

Septiani, D. (2017). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Penggajian dan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian terhadap Penggajian*. 958–979.

Sugiyono, D. (2010). Metode penelitian kuantitatif dan R&D. *Bandung: Alfabeta*, *33*.

Sumarno. (2020). *Buku Ajar Sistem Informasi Akuntansi dan Manajemen*.

Suryanti, E., Lesmana, H., Mubarok, H., & Zulfa, P. F. (2023). *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dan Pengupahan Pada Sebuah Perusahaan*. *03*(01), 17–24.

Triasari, D., & Maria, R. A. (2022). *Sistem Informasi Akuntansi Absensi Dan Penggajian Karyawan Pada PT . Infratech Indonesia*. *03*(2).

Wardany, I. (2025). *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Imbalan Kerja Karyawan Dinas Tenaga Kerja Parepare*. IAIN Parepare.

Wasundhari, P. D., & Pasek, N. S. (2024). *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Karyawan dalam Upaya Pengendalian Internal pada Koperasi Simpan Pinjam Winasa*. *14*(3), 376–384.

Wulaningrum, P. D., & Ayuningsih, N. A. (2022). *Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri: Studi Pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone*.